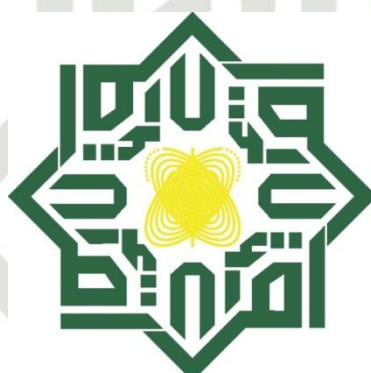


2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA KUALA SELAT
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM
TINJAUAN FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**ANDIGOD
NIM. 11424103819**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1441 H/ 2019 M

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA KUALA SELAT
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM
TINJAUAN FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

ANDIGOD

NIM. 11424103819

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1441 H/ 2019 M

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Kuala Selat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah* yang ditulis oleh :

Nama : Andigod

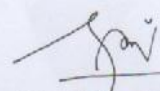
NIM : 11424103819

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2019

Pembimbing Skripsi



Afrizal Ahmad, M.Sy

NIK : 130217085



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, *PELAKSANAAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA KUALA SELAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH* yang ditulis oleh :

Nama : **ANDIGOD**
 NIM : 11424103819
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 31 Desember 2019 M
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan semu gedung belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Januari 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. H. Zainal Arifin, MA
 Nip. 19650704 199402 1001

Sekretaris
Syukran S.HI, M.Sy
 Nik. 130217 035

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag
 Nip. 19720308 200312 1002

Penguji II
Dr. H. Mawardi M. Shaleh, Lc., MA
 Nip. 19690624 200112 1002

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

ABSTRAK

Abstraksi ini berjudul “Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Kuala Selat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah”.

Pemerintahan Desa Kuala Selat pengisian perangkat Desa setelah pergantian Kepala Desa, Perangkat Desa diisi hanya berdasarkan penunjukan langsung oleh Kepala Desa terpilih, tanpa melalui seleksi sebagaimana yang diatur dalam . Setelah Kepala Desa menjalankan roda pemerintahannya selama satu tahun barulah proses seleksi perangkat desa dilakukan dan itupun hanya satu Kaur yang dibuka untuk melalui seleksi yaitu Kaur umum dan untuk kaur lainnya dipilih melalui penunjukan langsung kepala desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur bahwa kepala Dusun dipilih melalui tahapan seleksi. Namun di Desa Kuala Selat terdapat satu dusun dipilih melalui pemungutan suara langsung yang dipilih oleh masyarakat setempat, pemilihan ini sama halnya pemilihan Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat setempat

Persoalan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme rekrutmen perangkat desa Kuala Selat, bagaimanakah tinjauan Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 dan bagaimanakah tinjauan Fiqih Siyasah terhadap rekrutmen perangkat Desa Kuala Selat.

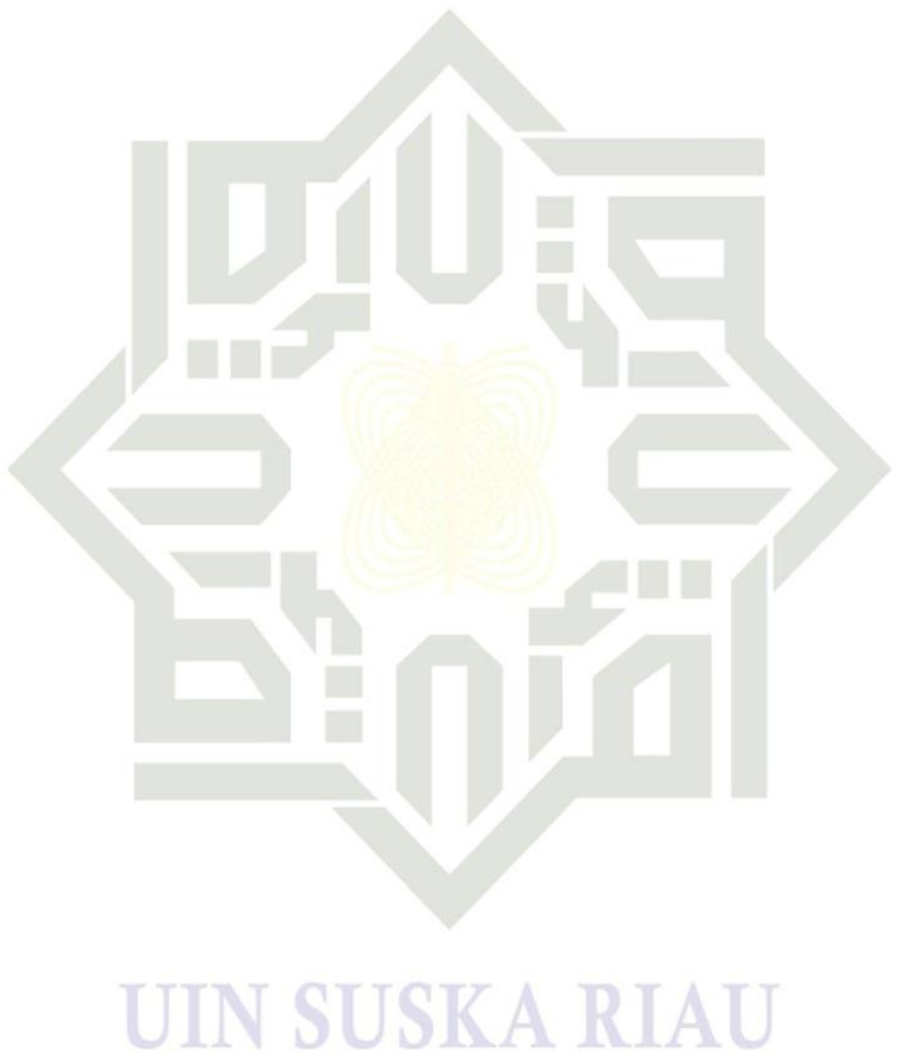
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam artian penelitian yang langsung mengumpulkan data di lokasi penelitian terhadap pelaksanaan rekrutmen perangkat desa Kuala Selat.

Keputusan Kepala Desa Nomor 27 tahun 2018 tersebut dia atas berdasarkan Perda Kab. INHIL Nomor 4 Tahun 2015 bukanlah Panitia Penjangkaran Perangkat Desa tetapi Panitia Pengisian Perangkat Desa. Keputusan Kepala Desa Nomor 27 tahun 2018 tersebut adalah Panitia Penjangkaran Perangkat Desa, maka tugasnya hanya pada tahap penjangkaran saja sebagaimana maksud pasal 31 sampai pasal 37 saja, dan tidak berhak melakukan tahap penyaringan dan tahap pengangkatan perangkat desa karena keputusan kepala desa tersebut adalah dasar panitia melakukan tugasnya. Pembentukan panitia pengisian perangkat desa kuala selat dilaksanakan terlambat dibentuk karena hampir semua masa jabatan perangkat desa telah berakhir masa jabatannya. Sedangkan berdasarkan pasal 32 ayat 1 Perda Kab. Inhil No. 4 tahun 2015 mestinya enam bulan sebelum masa jabatan perangkat desa tersebut kepala desa harus membentuk panitia pengisian perangkat desa. Kemudian terdapat formasi yang langsung diisi berdasarkan rekomendasi kepala desa kuala selat tanpa melalui proses seleksi sebagaimana formasi lainnya..Pembantu Khalifah bidang pemerintahan (*mu'awin Tafwidh*) adalah pembantu yang telah diangkat oleh Khalifah untuk membantunya dalam menjalankan tanggungjawab dan melaksanakan tugas-tugas keKhalifahaan. Dengan demikian langkah Kepala Desa langsung mengangkat perangkat desa

tanpa melalui proses seleksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 tidaklah bertentangan dengan fiqh siyasah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'ailaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam penulis haturkan untuk baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa cahaya bagi ummat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul: **“Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Kuala Selat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah”** merupakan hasil karya ilmiah, guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Ayahanda Ahmad dan ibunda tercinta Rohaya yang telah memberikan motivasi, do'a kepada ananda baik itu secara materil maupun spiritual, jasa dan kasih sayangmu akan ananda kenang hingga yaumul akhir kelak.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Bapak Riau Prof. Dr. K. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, Pembantu Dekan I Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL, Pembantu Dekan II Bapak Dr. Wahidin, M.Ag dan Pembantu Dekan III Bapak Dr. H. Maghfirah, MA.



4. Dosen pembimbing skripsi Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy. yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
 5. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag
 6. Penasehat Akademis Bapak Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag. yang telah memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis
 7. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau
 8. Kakanda Ambo Ako, S.Sy., M.H, Riki Twoendro, S.H., Abdul Hamid, S.H., Ilham Rizky Sitanggang, S.H., Muhammad Taufik, Kamaruzaman dan seluruh sahabat seperjuangan yang tidak disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas segala perhatian, motivasi dan dukungannya sehingga penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.
- Demikianlah skripsi ini penulis selesaikan dengan sebaik mungkin, namun penulis menyadari bahwa penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja, maka dari itu dengan segala kerendahan hati kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini dan masa yang akan datang.
- Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan hanya kepada Allah penulis memohon ampunan atas semua kesalahan, semoga skripsi ini dapat berguna, Aamiin...
- Pekanbaru, Desember 2019
Penulis
- ANDIGOD**
NIM. 11424103819

Dosen pembimbing skripsi Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy. yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag

Penasehat Akademis Bapak Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag. yang telah memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis

Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau

Kakanda Ambo Ako, S.Sy., M.H, Riki Twoendro, S.H., Abdul Hamid, S.H., Ilham Rizky Sitanggang, S.H., Muhammad Taufik, Kamaruzaman dan seluruh sahabat seperjuangan yang tidak disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas segala perhatian, motivasi dan dukungannya sehingga penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.

Demikianlah skripsi ini penulis selesaikan dengan sebaik mungkin, namun penulis menyadari bahwa penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja, maka dari itu dengan segala kerendahan hati kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini dan masa yang akan datang.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan hanya kepada Allah penulis memohon ampunan atas semua kesalahan, semoga skripsi ini dapat berguna, Aamiin...

Pekanbaru, Desember 2019
Penulis

ANDIGOD
NIM. 11424103819



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penelitian Terdahulu	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	18
A. Kondisi Desa	18
1. Sejarah Desa Kuala Selat	18
2. Demografi	18
3. Keadaan sosial.....	20
4. Keadaan ekonomi.....	22
B. Kondisi Pemerintahan Desa	24
1. Struktur Pemerintahan	24
2. Lembaga Kemasyarakatan.....	24
BAB III : TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Pengertian Desa.....	26
B. Struktur Desa.....	32
C. Otonomi Desa.....	38
1. Pengertian.....	38
2. Tujuan Otonomi Desa	48

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.....	49
E. Pemilihan Pemimpin Dalam Fiqih Siyasah.....	52
1. Khalifah (Kepala Negara)	57
2. Mu'awin	65
3. Mu'awin Tafwidh (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan)	66
4. Mu'awin Tanfidz (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi).....	66
5. Amirul Jihad (Panglima Perang).....	67
6. Wali (Pimpinan Daerah)	67
7. Qadli (Hakim)	67
8. Jihazul Idary (Aparat Administrasi).....	68
9. Majelis Ummat (Lembaga Wakil Rakyat)	68
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Mekanisme Rekrutmen Perangkat Desa Kuala Selat.....	70
B. Rekrutmen Perangkat Desa Kuala Selat Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.....	83
C. Tinjauan Fiqih Siyasah.....	84
BAB V : PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II: 01.	Jumlah Penduduk Desa Kuala Selat	19
Tabel II: 02.	Keadaan Tingkat Pendidikan Desa Kuala Selat	20
Tabel II: 03.	Jumlah Lembaga Pendidikan Desa Kala Selat	20
Tabel II: 04.	Keadaan Penganut Agama di Desa Kuala Selat	21
Tabel II: 05.	Jumlah Sarana Ibadah di Desa Kuala Selat	22
Tabel II: 06.	Jenis Tanaman di Desa Kuala Selat	22
Tabel II: 07.	Mata Pencanharian Masyarakat Desa Kuala Selat	23
Tabel: IV. 01	Peserta Seleksi Perangkat Desa Kuala Selat tahun 2019.	74
Tabel: IV. 02	Peserta Seleksi Perangkat Desa Kuala Selat tahun 2019 .	77
Tabel: IV. 03	Peserta Seleksi Perangkat Desa Kuala Selat tahun 2019 ..	79
Tabel: IV. 04	Peserta Seleksi Perangkat Desa Kuala Selat tahun 2019 ..	81

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹ Penjelasan mengenai desa dalam Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menggambarkan bentuk keseriusan Pemerintah Pusat untuk membangun dan memperhatikan Indonesia dari Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia².

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri.³

Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 3

Lihat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 280



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan definisi desa menurut Talizihudu Ndraha dalam bukunya *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.⁴

Menurut Eddi Handono dalam bukunya *Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa*, desa selalu diasosiasikan dengan dua gambaran utama, yaitu: (1) desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam, sehingga masyarakatnya sebagian besar masih sangat tergantung dengan alam, dan (2) desa sering diidentikkan dengan organisasi kekuasaan. Melalui kacamata ini, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara.⁵

Desa merupakan salah satu daerah otonom yang berada pada level terendah dari hierarki otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nurcholis bahwa, “desa adalah satuan pemerintahan terendah”. Salah satu bentuk urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala

⁴ Talizihudu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT Bina Aksara, Jakarta , 1981, hal. 13.

⁵ Eddie B. Handono, *Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa*, FPPD, Yogyakarta, 2005, hal. 132

sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.⁶

Ciri-ciri umum desa menurut Suhartono, yaitu:

1. Pada umumnya terletak atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (agraris).
2. Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan perekonomian yang dominan.
3. Faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya.
4. Tidak seperti di kota ataupun kota besar yang sebagian besar penduduknya merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti dengan sendirinya”.
5. Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antara warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka, dan
6. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat daripada kota.⁷

Dalam proses dan dinamika pembangunan desa tentu adanya hasil yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Dengan adanya pelimpahan kewenangan dan hak penuh terhadap desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan seluruh Desa yang ada di Indonesia mampu membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Desa telah diatur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hal. 81
 Suhartono, *Politik Lokal Parlemen Desa*, Laper Pustaka Utama., Yogyakarta, 2000, hal.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedemikian rupa terkait bagaimana peran dan fungsi serta partisipasi aparatur Pemerintah Desa maupun masyarakat untuk mewujudkan kemajuan dan kemandirian Desa. Tidak hanya itu, kapasitas dari elemen Pemerintahan Desa maupun masyarakat juga menjadi tolak ukur dari kemajuan Desa. Oleh karena itu, sangat diharapkan setiap Desa memiliki aparatur pemerintah dan perangkat Desa yang mempunyai kapasitas mumpuni dibidangnya masing-masing, artinya kemampuan menguasai tugas dan tanggung jawab yang di emban oleh aparatur dan perangkat Desa serta kemampuan melihat maupun menafsirkan peluang yang bisa dicapai untuk kemajuan Desa. Permasalahan yang banyak terjadi di Desa bahkan mencakup keseluruhan pinggiran Indonesia adalah kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintah Desa.

Kesulitan yang terjadi mengenai kapasitas maupun kompetensi yang dimiliki oleh perangkat Desa yang ada di sebagian maupun kebanyakan daerah yang ada di Indonesia adalah bagaimana pelaksanaan seleksi Perangkat Desa yang ada di setiap Desa, karena tidak sedikit masyarakat Desa yang ingin dan mengikuti seleksi untuk menjadi perangkat Desa, bahkan banyak masalah yang terjadi saat proses seleksi perangkat desa, misalnya banyak masyarakat yang mengikuti proses seleksi tetapi tidak memiliki latar belakang, maupun kapasitas dibidangnya, belum lagi beberapa kerjasama ataupun nepotisme yang sering diterapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 30⁸:

⁸ Lihat Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

1. Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui cara ujian tertulis.
2. Pengisian Perangkat Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :
 - a. Penjaringan;
 - b. Penyaringan; dan
 - c. Pengangkatan.

Adapun beberapa Persyaratan Calon Perangkat Desa yang diatur dalam, Pasal 31 adalah sebagai berikut:

1. Calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :
 2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 4. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 5. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat ujian tertulis;
 6. Penduduk desa setempat untuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Staf atau penduduk dusun setempat untuk Kepala Dusun, yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun terakhir terhitung sebelum diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Pengisian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Perangkat Desa yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu domisili yang dikeluarkan oleh ketua RT/RW diketahui oleh Kepala Desa ;
7. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 9. Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 11. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 12. Sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh RSUD atau Puskesmas;
 13. Perangkat Desa yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula apabila diangkat dalam jabatan yang lain;
 14. Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Staf sanggup bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Kepala Dusun sanggup bertempat tinggal di Dusun wilayah kerjanya selama menjabat; dan

16. Bakal Calon Kepala Dusun harus mendapat dukungan dari warga Dusun yang mempunyai hak pilih 15 % (lima belas per seratus) atau usulan dari warga Rukun Tetangga/Rukun Warga berdasarkan musyawarah.⁹

Pembentukan panitia pengisian yang mana telah diatur dalam Pasal 32

(1) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desa memproses pengisian Perangkat Desa.

(2) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :¹⁰

1. Ketua merangkap anggota;
2. Sekretaris merangkap anggota;
3. Bendahara merangkap anggota; dan/atau
4. Anggota.

Dalam pandangan Fiqih Siyasah yang membahas tentang perundang-undangan Negara disebut dengan *Siyasah Dusturiyah*, yang membahas

⁹ Lihat Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

¹⁰ Lihat Pasal 32 ayat (1-3) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persuaian dengan konsep-konsep agama dan merupakan realisasi kemasalahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Fiqih Siyasah tentang pengangkatan Imamah (pemimpin), ada istilah kata wazir. Yang mana wazir dapat di artikan sebagai menteri, Allah SWT berfirman mengisahkan Nabi-Nya Musa *Alaihis Salam* yang berbunyi ;

وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ أَشَدُّ بِمِزَّةِ آزْرِي ﴿٣١﴾ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾
 Artinya: “Dan jadikanlah untukku seorang menteri (pembantu) dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku. Dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku.” (Q.S. Thaaha: 29-32)

Jika kita lihat dari firman Allah SWT di atas maka *Wazir* itu diperbolehkan dalam masalah-masalah kenabian, maka lebih-lebih diperbolehkan adanya *wazir* di dalam Imamah.

Karena Iman tidak mungkin sanggup melaksanakan tugas-tugasnya di dalam mengatur umat tanpa adanya naib(*wazir*). Dengan adanya *wazir* yang membantu *Imam* di dalam mengurus umat, akan lebih baik pelaksanaannya dan terhindar dari kekeliruan serta kesalahan¹¹.

Selanjutnya untuk menjadi *wazir*, seseorang harus mempunyai kriteria-kriteria seperti kriteria-kriteria menjadi *Imam* (khalifah), kecuali nasab. Karena seorang *wazir* adalah pelaksanaan gagasan dan ijtihad, ia harus mempunyai sifat-sifat mujtahid. Selain itu seorang *wazir* harus mempunyai

¹¹ H.A. Djazuli *Fiqih Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah)*, Jakarta: Kencana, 2009), cet.ke-4, hal.78

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kriteria tambahan di luar kriteria-kriteria *Imam* (khalifah) yaitu harus mempunyai keahlian terhadap tugas yang diembankan kepadanya, seperti urusan perang dan pajak. Ia harus mempunyai keahlian terhadap kedua persoalan tersebut, dan mengetahuinya dengan detail. Ia sekali waktu terjun langsung menanganinya dan sekali waktu menugaskan orang lain terhadap keduanya. Jika *wazir* tidak memiliki sifat-sifat mujtahid, ia tidak bisa menugaskan orang lain mewakili dirinya, dan ia tidak mampu terjun langsung menjalankan tugas-tugasnya, itulah poros *wazir* (menteri), dan dengannya politik berjalan dengan baik¹².

Desa Kuala Selat adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, secara geografis Desa Kuala Selat berbatasan langsung dengan Keplauan Riau. Pada tahun 2017 desa Kuala Selat tersebut melaksanakan pemilihan Kepala Desa karena masa jabatan Kepala Desa telah berakhir.

Dalam hasil pemilihan kepala desa tersebut terpilih Kepala Desa yang baru yaitu Bapak Imam Taufik yang juga merupakan putra daerah. Setelah terpilihnya kepala desa yang baru, perangkat desa Kuala Selat juga akan mengalami pergantian karena masa jabatan perangkat desa juga akan berakhir.¹³

Berdasarkan pasal 32 di atas tersebut bahwa 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan perangkat Desa, Kepala Desa harus memproses pengisian perangkat desa.

¹² Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), cet. Ke-2, hal.38

¹³ Junaidi (Ketua Panitia Penjaringan Perangkat Desa), *Wawancara*, tanggal 13 September 2019.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan Desa Kuala Selat pengisian perangkat Desa setelah pengantian Kepala Desa, Perangkat Desa diisi hanya berdasarkan penunjukan langsung oleh Kepala Desa terpilih, tanpa melalui seleksi sebagaimana yang diatur dalam perda tersebut. Setelah Kepala Desa menjalankan roda pemerintahannya selama satu tahun barulah proses seleksi perangkat desa dilakukan sebagaimana Keputusan Kepala Desa Kuala Selat Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Penjaringan Perangkat Desa.

Berdasarkan Keputusan tersebut, panitia membuka formasi perangkat desa 4 orang dengan posisi sekretaris desa 1 orang, KAUR Umum orang, KADUS Hidayah orang dan KADUS Cahaya Alam 1 orang. KAUR Keuangan tidak melalui seleksi tetapi penunjukan langsung dari Kepala Desa dan KADUS Hidayah tidak melalui Seleksi tetapi melalui pemilihan langsung oleh masyarakat.¹⁴

Berdasarkan pasal 33 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur bahwa kepala Dusun dipilih melalui tahapan seleksi. Namun di Desa Kuala Selat terdapat satu dusun dipilih melalui pemungutan suara langsung yang dipilih oleh masyarakat setempat, pemilihan ini sama halnya pemilihan Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut. Oleh karena itu penullis memberi judul proposal skripsi adalah “**Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Kuala Selat**

¹⁴ Junaidi (Ketua Panitia Penjaringan Perangkat Desa), *Wawancara*, tanggal 13 September 2019.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah”.

Penelitian Terdahulu

Desa Kuala Selat pernah menjadi lokasi penelitian Ambo Ako pada tahun 2011 dengan judul penelitiannya adalah Masa Jabatan Kepala Desa Kuala Selat Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa masa jabatan Kepala Desa Kuala Selat dua kali periode dengan proses pemilihan umum dan satu priode jabatan dengan tidak melalui proses pemilihan karena menjadi desa defenitif atau terjadi pemekaran desa baru. Adapun dalam perspektif fiqih siyasahnya adalah bahwa dalam fiqih siyasah tidak ada membatasi masa jabatan seorang imam, oleh karenanya tidak bertentangan dengan fiqih siyasah.

Penelitian di atas tersebut hanya mengkaji soal masa jabatan Kepala Desa Kuala Selat dan tidak mengkaji soal mekanisme rekrutmen perangkat desa. Kemudian penelitian saudara Ambo Ako di atas tersebut dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bukan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan rekrutmen perangkat Desa Kuala Selat berdasarkan Peraturan Daerah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengukin kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam tinjauan Fiqih Siyasah.

Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam penulisan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme rekrutmen perangkat Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimanakah tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa terhadap mekanisme rekrutmen perangkat Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap rekrutmen perangkat Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme rekrutmen perangkat Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa terhadap mekanisme rekrutmen perangkat Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap rekrutmen perangkat Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri hilir.

2. Mamfaat Penelitian

- a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang mekanisme pemilihan perangkat Desa di Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk menjadi bahan informasi maupun perbandingan bagi pihak-pihak yang berminat untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.
- c. Semoga tulisan ini dapat menjadi sumbangan penulis kepada almamater dan juga melengkapi bahan perpustakaan

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang artinya mengkaji sistem rekrutmen perangkat Desa di Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini adalah Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Subjek dan Objek

- a. Subjek dari penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pembangunan dan Pemberdayaan, Kaur Kemasyarakatan, Kepala Dusun dan Staf.

- b. Objek Penelitian ini adalah Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Tinjauan Fiqih Siyasah

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari subjek yang menjadi penelitian yang ditentukan sebelumnya.¹⁵ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 14 orang. Sedangkan sampel ditelaah dengan menggunakan teknik *total sampling* (teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi).

5. Data dan Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini ada tiga sumber, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang langsung diperoleh dari Informen yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak Pemerintah Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 98



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku-buku yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti teori tentang definisi desa, mekanisme rekrutmen perangkat Desa dan lain sebagainya.

c. Data tertier.

Data pendukung lainnya seperti, kamus, jurnal, undang-undang, ensiklopedi, dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tiga cara yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung tentang proses seleksi perangkat desa di desa Kuala Selat.
- b. Wawancara yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada informan dengan membuat daftar pertanyaan-pertanyaan sebagai acuan dalam mengajukan pertanyaan kepada pihak Pemerintah Desa.
- c. Kajian kepustakaan yaitu, penulis menguraikan berbagai sudut analisis berdasarkan kepustakaan yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini dan metode yang tepat untuk menemukan solusi terhadap rumusan masalah.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menggambarkan data

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperoleh akan dianalisis dengan cara memaparkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, serta menguraikannya guna memberikan gambaran yang jelas.¹⁶

Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi: Latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Meliputi tentang Profil Desa Kuala Selat. .

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Meliputi: definisi desa, mekanisme rekrutmen perangkat desa, panitian pengisian perangkat desa, rekrutmen perangkat desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan rekrutmen pemimpin dalam fiqih siyasah

BAB IV : HASIL PENELITIAN

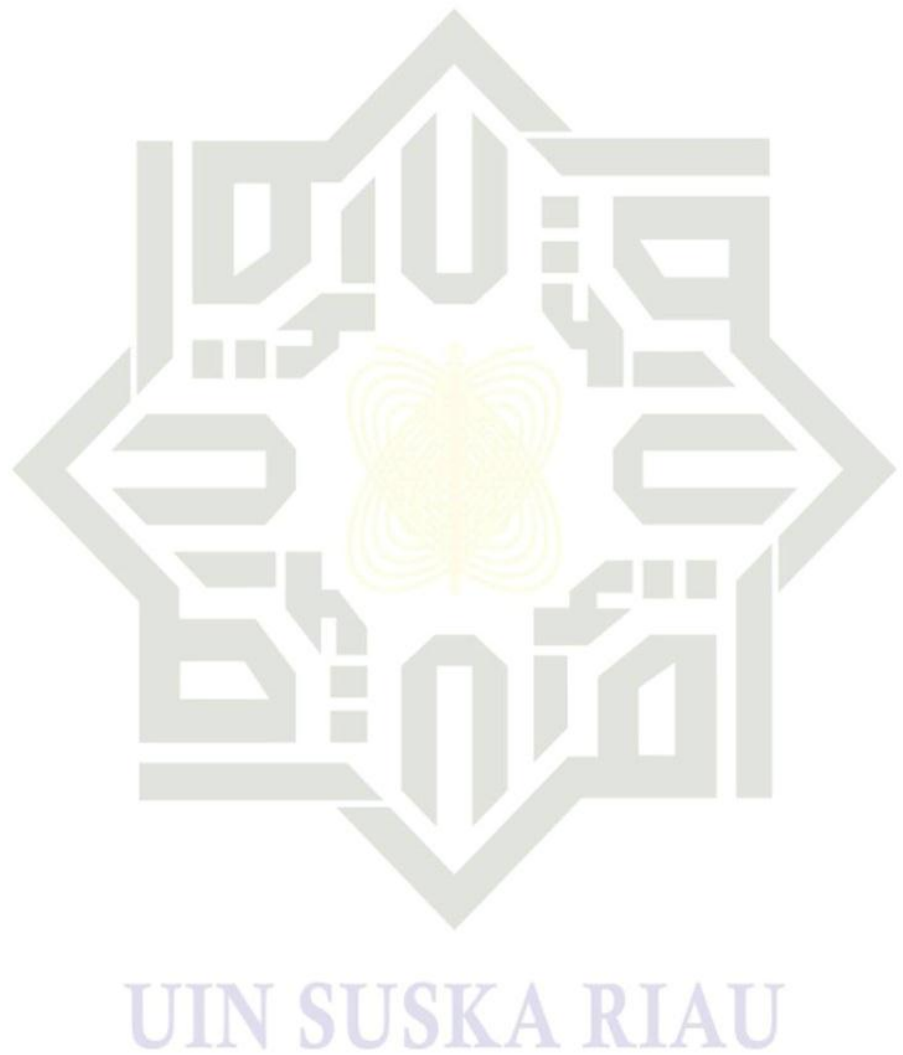
Mekanisme rekrutmen perangkat Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa terhadap mekanisme rekrutmen perangkat Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman, dan tinjauan fiqih Siyasah terhadap rekrutmen

¹⁶ Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, hal. 28

perangkat Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten
Indragiri Hilir

BAB V : PENUTUP

Meliputi Kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kondisi Desa

1. Sejarah Desa Kuala Selat

Desa kuala selat terletak di belahan timur kecamatan kateman yang berbatas langsung dengan laut kepulauan riau yang letak desanya juga di pesisir pantai tepatnya di muara sungai selat pedada, karena letaknya dipesisir pantai inilah maka banyak nelayan-nelayan kecil dari daerah lain berdatangan untuk menangkap ikan, karena jauh dari keramaian akhirnya para nelayan mulai membangun rumah kecil tempat berhenti sementara selama melaut, karena mata pencaharian mereka nelayan akhirnya mereka memilih menetap di sini dari berawal satu rumah terus bertambah hingga menjadi sebuah perkampungan yaitu desa kuala selat¹⁷.

2. Demografi

Batas wilayah desa

Letak geografis Desa Kuala Selat, terletak diantara:

Sebelah utara	berbatasan dengan	Desa Tritip
Sebelah selatan	berbatasan dengan	Desa Makmur Jaya
Sebelah barat	berbatasan dengan	Desa Penjuru
Sebelah timur	berbatasan dengan	Laut Kepulauan Riau ¹⁸



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Luas wilayah desa

Pemukiman 6.800 Ha, pertanian sawah 925 Ha, ladang tegalan 1.360 Ha, perkebunan 38.080 Ha, hutan 17.000 Ha, rawa-rawa 1.020 Ha, perkantoran 7 Ha, sekolah 27 Ha, jalan 2.720 Ha, dan lapangan sepak bola 54 Ha¹⁹.

Orbitasi

Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat sejauh 25 KM dengan jarak tempuh selama 1 jam 30 menit menggunakan speed boat. Sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten sejauh 165 KM dengan jarak tempuh selama 4 jam 30 menit menggunakan speed boat²⁰.

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel II: 01. Jumlah Penduduk Desa Kuala Selat

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2078
2	Perempuan	1817
Jumlah		3895

Sumber Data: RPJMDes Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019.

Tabel di atas menunjukkan Desa Kuala Selat memiliki 867 Kepala Keluarga yang terdiri dari 2078 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1817 jiwa berjenis kelamin perempuan.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

3. Keadaan Sosial

a. Pendidikan

Tabel II: 02. Keadaan Tingkat Pendidikan Desa Kuala Selat

No	Jenis Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1	TK/PAUD	117 Orang
2	SD/MI	974
3	SLTP/MTS	974
4	SLTA/MA/SMK	896
5	S1/Diploma	234
6	Putus Sekolah	390
7	Buta Huruf	312

Sumber Data: RPJMDes Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan pada tahun 2019 keadaan tingkat pendidikan masyarakat di Desa Kuala Selat ialah TK/PAUD 117 orang, SD/MI 974 orang, SLTP/MTs 974 orang, SLTA/MA/SMK 896 orang, S1/Diploma 234 orang, putus sekolah 390 orang dan buta huruf 312 orang.

b. Lembaga pendidikan

Tabel II: 03. Jumlah Lembaga Pendidikan Desa Kala Selat

No	Nama Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	TK/PAUD	1
2	SD/MI	2
3	SMP/MTS	2
4	SLTA/SMK	1
Jumlah		6

Sumber Data: RPJMDes Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan lembaga pendidikan di desa kuala selat terdapat 1 buah TK/PAUD, 2 buah SD/MI, 2 SMP/MTs, dan 1 buah SLTA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Kesehatan

1) Kelahiran bayi

Jumlah bayi yang lahir pada tahun 2019 adalah sebanyak 35 bayi, sedangkan bayi yang meninggal adalah 2 bayi, dan terdapat 1 orang ibu melahirkan meninggal dunia.

2) Cakupan imunisasi

Sedangkan cakupan imunisasi di desa kuala selat ialah 68 orang cakupan imunisasi polio 3, 85 orang cakupan imunisasi DPT-1, dan 35 orang cakupan imunisasi cacar.

3) Gizi balita

Pada tahun 2019 di desa kuala selat terdapat 68 orang balita, 1 orang menderita gizi buruk, 2 orang dalam keadaan gizi kurang dan 65 orang dalam keadaan kondisi gizi baik.

4) Pemenuhan air bersih

Terdapat 20 kepala keluarga pengguna sumur galian dan 235 kepala keluarga pengguna sumur pompa. Sementara mayoritas masyarakat desa kuala selat dalam pemenuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari ialah menggunakan air hujan²¹.

5) Keagamaan

Tabel II: 04. Keadaan Penganut Agama di Desa Kuala Selat

No	Nama Agama	Jumlah
1	Islam	3817 orang
2	Budha	78 orang
Jumlah		3895

Sumber Data: RPJMDes Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019

²¹ Ibid.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel di atas menunjukkan mayoritas masyarakat desa kuala selat beragama Islam yaitu sekitar 3817 orang, sedangkan terdapat 78 orang menganut agama budha, dan tidak terdapat masyarakat yang menganut agama kristen, katolik dan hindu.

Tabel II: 05. Jumlah Sarana Ibadah di Desa Kuala Selat

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Masjid	3
2	Musholla	6
3	Vihara	1
Jumalh		10

Sumber Data: RPJMDes Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019

Tabel di atas menunjukan tempat ibadah di desa kuala selat terdapat 3 buah mesjid, 6 buah musollah dan 1 buah vihara.

4. Keadaan Ekonomi

a) Pertanian

Tabel II: 06. Jenis Tanaman di Desa Kuala Selat

No	Jenis Tanaman	Jumlah
1	Jagung	640 Ha
2	Kakao/Coklat	120 Ha
3	Kelapa Kampung	30.000 Ha
4	Tanaman lainnya	76 Ha
Jumalh		30.836 Ha

Sumber Data: RPJMDes Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan jenis tanaman terdiri dari jagung 640 Ha, kakao/coklat 120 Ha, kelapa kampung 30.000 Ha, dan lain-lainnya 76 Ha.

Peternakan

Jenis ternak diantaranya kambing, sapi, ayam dan itik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Struktur mata pencaharian

Tabel II: 07. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kuala Selat

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	326 orang
2	Pedagang	45 orang
3	Pegawai Negeri Sipil	10 orang
4	Tukang	47 orang
5	Guru	24 orang
6	Bidan/Perawat	4 orang
7	TNI/Polri	2 orang
8	Nelayan	350 orang
9	Supir Angkutan	5 orang
10	Buruh	27 orang
11	Swasta	23 orang

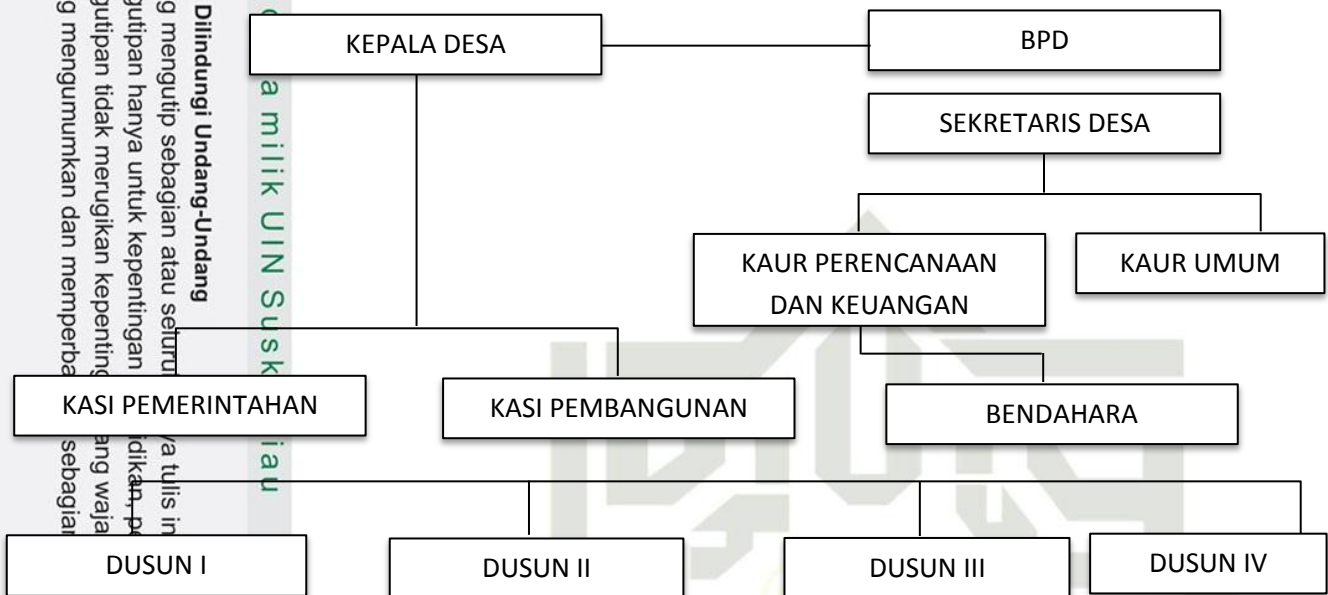
Sumber Data: RPJMDes Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis pekerjaan diantaranya petani, pedagang, Pegawai Negeri Sipil, tukang, guru, bidan/perawat, TNI/Polri, nelayan, sopir angkutan, buruh, jasa persewaan dan swasta.

UIN SUSKA RIAU

B. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Struktur Pemerintahan



Dari skema struktur di atas menunjukkan bahwa unsur pemerintahan Desa Kuala Selat adalah Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, KAUR Perencanaan

2. Lembaga Kemasyarakatan

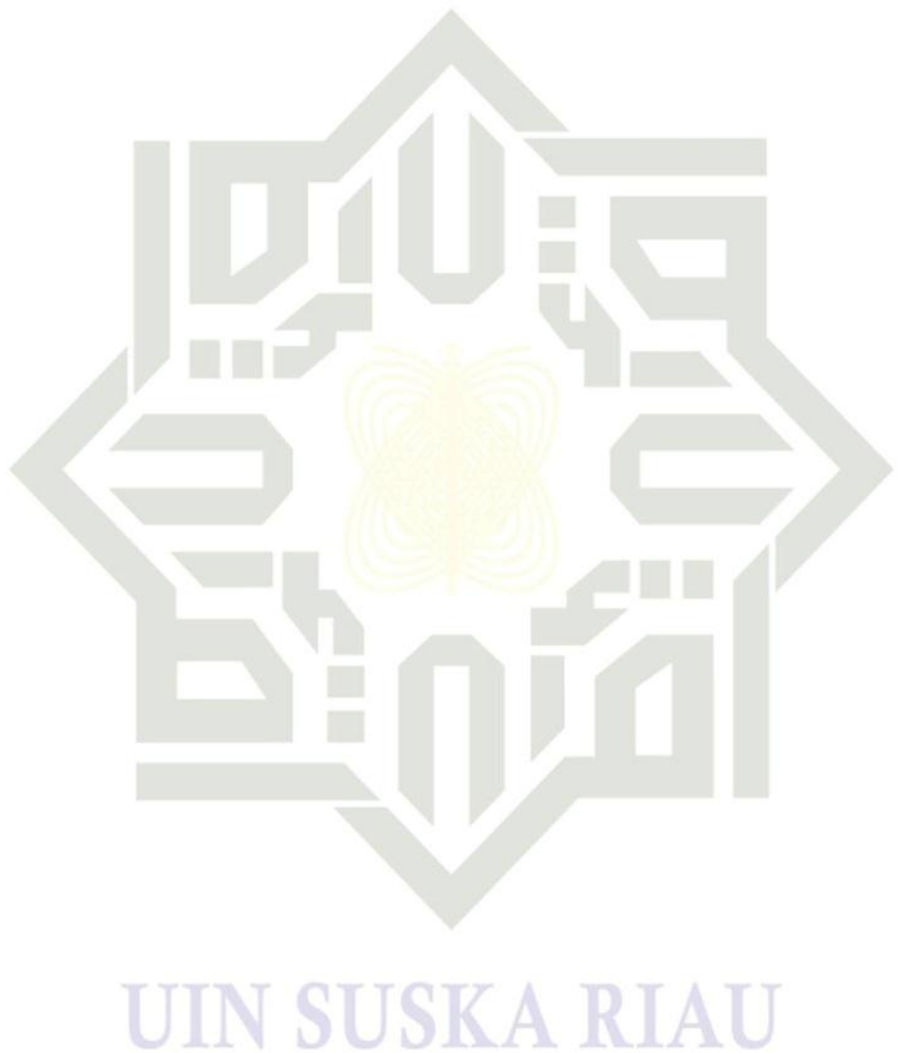
Tabel II: 08. Lembaga Kemasyarakatan Desa Kuala Selat

No	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah
1	LPM	1 Lembaga
2	PKK	1 Lembaga
3	Posyandu	2 Unit
4	Pengajian	4 Kelompok
5	Arisan	4 Kelompok
6	Lembaga Simpan Pinjam	1 Unit
7	Kelompok Tani	5 Kelompok
8	Gapoktan	10 Kelompok
9	Karang Taruna	1 Kelompok
10	Ormas/LSM	1 Kelompok
Jumlah		30 Lembaga/Kelompok

Sumber Data: RPJMD Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019



Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah lembaga kemasyarakatan, KPM 1 lembaga, PKK 1 Lembaga, Posyandu 2, pengajian 4 kelompok, arisan 4 kelompok, simpan pinjam 1 kelompok, kelompok tani 5 kelompok, apoktan 10 kelompok, karang taruna 2 kelompok, orma/LSM 1 kelompok.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.²²

Menurut R Bintaro, berdasarkan tinjauan geografi yang diemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.²³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota

²² Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal.3

²³ R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989, hal.45

yang merupakan kesatuan.²⁴ Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah:

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013. hal.2

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁶.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan atauoun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipai, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah , lebih jelasnya pemikiran ini

²⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1

didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan ”. Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Pemusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (Paraturan).

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri²⁷. Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permasyarakatan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat- istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁸

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁷ Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6

²⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi.

Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah²⁹.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:³⁰

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

hal. 5 ²⁹ Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban:

1. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas

yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

B. Struktur Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut *staf*. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah, bahwa Kepala Desa berwenang untuk:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Jika ada wewenang, tentu ada kewajiban, wewenang yang dimaksud diatas merupakan format yang diakui oleh kontitusi Negara Republik



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Sedangkan untuk kewajiban untuk menjadi Kepala Desa tidaklah mudah, diantaranya adalah:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
3. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
5. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
6. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
7. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
8. Mengelola keuangan dan Aset Desa;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
10. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
11. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
12. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
13. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
14. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi³¹:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a Undang-Undang Desa yang berbunyi:

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa Pasal 48 dalam melaksanakan tugas,

³¹ Lihat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan, hak, kepala desa wajib: menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Kota, menyampaikan laporan keterangan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Lebih lanjut dalam Pasal 51 Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Dari uraian tersebut sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Mari kita cermati ketentuan pasal 48 dan 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Selain bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan undang-undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercantum dalam Pasal 48. Perangkat desa terdiri atas:

- a. Sekretariat desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.³² Untuk melaksanakan tugas- tugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Dengan demikian susunan organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Desa.

³² Lihat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Struktur organisasi pemerintah desa harus disesuaikan dengan kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Asnawi Rewansyah (2011) ada 5 (lima) fungsi utama pemerintah yaitu: (1) Fungsi pengaturan/regulasi, (2) Fungsi pelayanan kepada masyarakat, (3) Fungsi pemberdayaan masyarakat, (4) Fungsi pengelolaan asset/kekayaan dan (5) Fungsi pengamanan dan perlindungan.

C. Otonomi Desa

1. Pengertian

Menurut Widjaja, menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.³³

Berkaitan dengan otonomi asli menurut Fakrulloh dkk bahwa dalam makna otonomi asli terdapat dua aliran pemikiran yaitu: (1) aliran pemikiran pertama memakai kata otonomi asli sebagai adat atau dekat dengan sosial budaya, (2) aliran pemikiran yang memaknai sebagai otonomi asli yang diberikan, oleh karenanya digagasan pemikiran bahwa

³³ Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 165

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otonomi desa sebagai otonomi masyarakat sehingga lebih tepat disebut otonomi masyarakat desa.³⁴

Juliantara menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya, sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak, dan tidak melihat realitas komunitas.³⁵

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa, namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap mengunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.³⁶

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah Kabupaten dan daerah Kota.

³⁴ Fakrullah, Zudan, dkk. 2004. *Kebijakan Desentralisasi Persimpangan*. Jakarta. CV. Ciprui. hal. 7

³⁵ Juliantara, Dadang, 2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama. hal. 116

³⁶ Widjaja, *Op.Cit.*, hal 166

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah.

Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha menjelaskan sebagai berikut.³⁷

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya, dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Undang-Undang Desa mengatur tata kelola pemerintahan desa, baik perangkat, masyarakat, maupun pengembangan ekonomi yang mungkin dikembangkan di desa serta penguatan sistem informasi desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan tinggi dalam pengembangan desa. Selain itu, dibangunnya mekanisme *checks and balances* kewenangan di desa dengan pengaktifan BPD untuk mendorong akuntabilitas pelayanan yang lebih baik kepada warga desa. Bila Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini diterapkan secara sungguh-sungguh, akan terjadi pemberdayaan dari unit pemerintahan desa untuk menggerakkan roda pembangunan. Otonomi desa ini harus diiringi kesadaran akan pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan.

³⁷ Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa*. Yayasan Karya Dharma IIP. Jakarta. hal. 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi Desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kaesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa Desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi Desa menuntut tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

Pengaturan eksistensi desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mesti diakui memberi peluang bagi tumbuhnya otonomi desa. Sejumlah tekanan dalam beberapa pasal memberi diskresi yang memungkinkan otonomi desa tumbuh disertai beberapa syarat yang mesti diperhatikan oleh pemerintah desa, masyarakat desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Syarat tersebut penting menjadi perhatian utama jika tidak ingin melihat kondisi desa bertambah malang nasibnya. Dari aspek kewenangan, terdapat tambahan kewenangan desa selain kewenangan yang didasarkan pada hak asal usul sebagaimana diakui dan dihormati negara. Tampak bahwa asas subsidiaritas yang melandasi undang-undang desa memberikan keleluasaan dalam penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa

³⁸ Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 166



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa, atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, rembung desa dan jalan desa.³⁹

Konsekuensi dari pertambahan kewenangan tersebut memungkinkan desa dapat mengembangkan otonomi yang dimiliki bagi kepentingan masyarakat setempat. Implikasinya desa dapat menggunakan sumber keuangan yang berasal dari negara dan pemerintah daerah untuk mengembangkan semua kewenangan yang telah ada, yang baru muncul, dan sejumlah kewenangan lain yang mungkin merupakan penugasan dari supradesa. Untuk mendukung pelaksanaan sejumlah kewenangan tersebut, desa dan kepala desa memiliki kewenangan yang luas guna mengembangkan otonomi asli melalui sumber keuangan yang tersedia.

Sterilisasi desa dari perangkat desa yang berasal dari pegawai negeri sipil menjadi momentum bagi pemerintah desa untuk mengembangkan otonominya sesuai perencanaan yang diinginkan tanpa perlu takut di sensor ketat oleh sekretaris desa. Selain kewenangan berdasarkan hak asal-usul yang telah ada dan kewenangan berskala lokal desa, semua kewenangan tambahan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah maupun pusat hanya mungkin dilaksanakan jika disertai oleh

³⁹ Fakhruallah, *Op. Cit.*, hal. 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan yang jelas.⁴⁰ Terkait dengan itu, undang-undang desa menentukan bahwa sumber keuangan desa secara umum berasal dari APBN, APBD, PAD dan sumber lain yang sah. Jika diperkirakan pemerintah mampu menggelontorkan setiap desa sebanyak 10% dari total APBN, plus ADD sebesar 10% dari Pajak/Retribusi/DAU/DBH, ditambah Pendapatan Asli Desa dan sumbangan lain yang sah, maka setiap desa kemungkinan akan mengelola dana di atas 1 Milyar perdesa pada 72.944 desa di Indonesia.

Dengan sumber keuangan yang relatif cukup dibanding kuantitas urusan yang akan dilaksanakan, desa sebetulnya dapat lebih fokus dalam mengintensifikasi pelayanan publik serta pembangunan dalam skala yang lebih kecil. Kenyataan tersebut setidaknya mendorong otonomi yang dimiliki untuk menjadikan semua urusan yang telah diakui dan dihormati negara, ditambah urusan skala lokal bukan sekedar pajangan, tetapi akumulasi dari seluruh aset yang memungkinkan desa bertambah kaya dengan modal yang dimilikinya. Sumber asli yang berasal dari desa dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik agar masyarakat dapat lebih efisien dan efektif dilayani oleh pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa selama ini menggambarkan rendahnya dukungan sarana dan prasarana sehingga pelayanan di desa tak maksimal.

Kantor desa bahkan secara umum tak berfungsi kecuali pada waktu-waktu tertentu. Dalam banyak hal desa harus diakui tertinggal dari

⁴⁰ Ibid, hal. 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai disebabkan rendahnya dukungan pemerintah daerah sekalipun dalam semangat otonomi. Sementara sumber keuangan yang berasal dari APBN dapat diarahkan bagi kepentingan pembangunan desa. Tentu saja selain alokasi pembangunan yang berasal dari pemerintah, desa dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dalam jangka panjang sehingga terjadi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Realitas desa sejauh ini menunjukkan lemahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya kemiskinan dan pengangguran sehingga menurunkan daya saing desa dibanding kota. Sumber keuangan negara setidaknya berpeluang mendorong laju pertumbuhan ekonomi desa sehingga tak jauh ketinggalan dibanding kota. Sekalipun demikian, alokasi APBN tidaklah merupakan wujud dari pendekatan *local state government* semata, tetapi lebih merupakan tanggungjawab negara yang diamanahkan konstitusi. Demikian pula alokasi APBD bukanlah merupakan manifestasi dari pendekatan *local self government* semata, namun perintah undang-undang pemerintahan daerah. Jadi, sekalipun desa dalam undang-undang ini bersifat *self governing community*, namun negara dan pemerintah daerah tetap bertanggungjawab untuk mengakui, menghormati dan memelihara keberlangsungan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Bentuk pengakuan negara terhadap desa dapat dilihat dari pengakuan atas realitas keberagaman desa di berbagai daerah (asas rekognisi). Sedangkan konkritisasi dari penghormatan negara terhadap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa adalah terbukanya kran alokasi negara secara langsung yang akan dikelola desa (asas subsidiaritas). Penggunaan kedua asas tersebut sekalipun didahului oleh pengakuan konstitusi atas keragaman dan batasan desa dalam pengertian umum (desa, desa adat dan atau nama lain), setidaknya menjadi pijakan konkrit dalam pengaturan desa lebih lanjut di tingkat daerah masing-masing.

Terkait postur organisasi pemerintahan desa, batasan pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa semata tanpa posisi BPD. Batasan tersebut berbeda jika dibandingkan dengan pengaturan dalam PP Nomor 72 tahun 2005, dimana pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan BPD. Pemisahan posisi kepala desa beserta perangkatnya dari BPD memungkinkan pemerintahan desa lebih efektif dalam melaksanakan otonomi desa selain kewajiban dari supradesa. Pengalaman menunjukkan bahwa kolektivitas kepala desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa sulit dilaksanakan karena kedua lembaga tak selalu sejalan dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Terpisahnya posisi BPD memungkinkan pemerintah desa dapat lebih leluasa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa pengawasan ketat BPD yang selama ini relatif sulit hidup sekamar dengan pemerintah desa. Bias dari kondisi semacam itu tak jarang membuat desa kurang dinamis, bahkan statis karena saling menunggu persetujuan yang berlarut-larut. Selain itu, separasi semacam itu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih modern, dimana secara politik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengutipan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi diferensiasi antara desainer kebijakan (BPD) dan implementator kebijakan (kepala desa).

BPD setidaknya mewakili masyarakat yang dipilih secara demokratis untuk membahas suatu kebijakan sebelum dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kebijakan desa dimulai dari tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi. Perencanaan desa merupakan perencanaan jangka menengah yang dijabarkan dalam bentuk perencanaan pembangunan tahunan. Perencanaan desa dapat dikembangkan sejalan dengan periodisasi kepemimpinan kepala desa yang dapat mencapai tiga kali masing-masing selama enam tahun. Artinya, perencanaan menengah desa dapat berjalan selama 18 tahun bergantung pada elektabilitas kepala desa. Dengan demikian selama periodisasi yang relatif lebih lama dibanding kepala daerah yang hanya dua periode, desa dengan sendirinya berpeluang meletakkan perencanaan secara berkelanjutan melalui prioritas yang disepakati bersama masyarakat setempat.

Dalam kerangka pelaksanaan pembangunan, desa membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Peluang bagi pengembangan otonomi desa yang demokratis tampak terbuka lebar dimana masyarakat berhak memperoleh informasi, melakukan pemantauan serta melaporkan semua aktivitas yang dinilai kurang transparan kepada pemerintah desa dan BPD. Proses semacam ini merupakan bentuk pembelajaran partisipasi demokrasi melalui siklus perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan di desa. Dengan demikian tercipta mekanisme *bottom up* yang senyatanya,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengukuhkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan rekayasa musyawarah pembangunan desa seperti yang terjadi selama ini.

Pembangunan desa sejauh ini tak memperlihatkan hasil signifikan karena tak jelas darimana sumber penunjangnya. Alokasi dana desa yang semestinya terjadi tampak bergantung pada kemurahan hati pemerintah daerah. Sementara pendapatan asli desa menyusut hingga tak bersisa akibat meresapnya peraturan daerah hingga ke kawasan desa yang paling strategis. Dalam regulasi inilah pembangunan desa diharapkan dapat ditopang lewat aset desa, termasuk sumber keuangan desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Sumber keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, negara, pemerintah daerah dan pendapatan lain yang sah. Sedangkan BUM desa dapat digunakan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pembangunan desa juga meliputi upaya pengembangan kawasan desa dengan maksud untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki hak untuk dilibatkan dalam perencanaan makro pemerintah daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga desa tak sekedar menjadi objek pembangunan semata. Selain itu desa berhak memperoleh akses informasi yang dapat dikelola bagi kepentingan *stakeholders* terkait. Hal itu mendukung terciptanya proses pemerintahan yang lebih transparan dalam kerangka *good governance*. Lebih dari itu peluang pengembangan otonomi memungkinkan desa dapat meluaskan pembangunan melalui strategi kerjasama dengan desa lain yang saling menguntungkan

2. Tujuan Otonomi Desa

Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangaun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa, untuk itu desa tidak dikelola secara teknokratis tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mngendung tata aturan, nilai, norma, kaidah, dan pranata-pranata sosial lainnya. Potensi-potensi desa berupa hak tanah (tanah bengkok, titisari dan tanah-tanah khas Desa lainnya), potensi penduduk, sentra-sentra ekonomi dan dinamika sosial-politik yang dinamis itu menuntut kearifan dan professionalisme dalam pengelolaan desa menuju optimalisasi pelayanan, pemberdayaan, dan dinamisasi pembangunan masyarakat desa.

Perncanaa desa akan memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi desa untuk menggali inisiatif lokal (gagasan, kehendak dan kemauan lokal) yang kemudian dilembagakan menjadi kebijakan, program dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa. Kemandirian itu sama dengan otonomi desa yang mempunyai relevansi (tujuan dan manfaat) sebagai berikut:⁴¹

- a. Memperkuat kemandirian desa berbasis kemandirian NKRI
- b. Memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan
- c. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat
- d. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
- e. Menciptakan efesiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
- f. Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa;
- g. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa;
- h. Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan;
- i. Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah Desa, lembaga-lembaga Desa dan masyarakat;
- j. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

D. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pelaksanaan rekrutmen perangkat desa dimulai dengan pembentukan panitia pengisian perangkat desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan

⁴¹ <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/03/memahami-otonomi-desa-dari-berbagai.html>. Diunduh pada pukul 11:01 tanggal 7 Desember 2019

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang terdapat pada Pasal

32 sebagai berikut:

1. Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desa memproses pengisian perangkat desa.
2. Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota
 - c. Bendahara merangkap anggota
 - d. Anggota
4. Penentuan Panitia Pengisian Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 secara proporsional dengan melibatkan lebih banyak peran serta masyarakat.
5. Panitia Pengisian Perangkat Desa berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa, dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan, maka dilakukan dengan pengungutan suara.
7. Untuk keperluan administrasi, Panitia Pengisian Perangkat Desa dapat menggunakan Cap/Stempel Panitia Pengisian Perangkat Desa.
8. Tugas Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah:
 - a. Mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa.
 - b. Menyusun jadwal dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan konsultasikan kepada Camat.
 - c. Menyusun RAB pengisian Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat.
 - d. Menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat.
 - e. Menerima pendaftaran calon.
 - f. Melaksanakan penelitian persyaratan bakal calon
 - g. Mengumumkan calon kepada masyarakat
 - h. Meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap calon.
 - i. Mengajukan calon yang lolos atas keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti seleksi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Menyelenggarakan seleksi bagi calon yang berhak mengikuti
- k. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.
 - l. Membuat berita acara hasil seleksi yang disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa
 - m. Melaporkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
9. Panitia Pengisian Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
10. Panitia Pengisian Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32 ayat 1 di atas menyatakan bahwa paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa.

E. Pemilihan Imam (Khalifah) dalam Fiqih Siyash

Jika anggota *ahlul al-aqdi wa al-hal* (parlemen) mengadakan sidang untuk memilih *imam*, mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria *imamah* (kepemimpinan), kemudian mereka memilih siapa saja di antara orang-orang tersebut yang paling banyak kebabiannya, yang paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat dan mereka tidak menolak membai'atnya⁴².

⁴² Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*, (Beirut: Daar El-Kitab Al-Araby). Edisi Indonesia, Penerjemah Fadli Bahri, Lc, (Jakarta: PT. Darul Falah), 2007, hal. 6



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika di antara hadirin ada yang paling ahli berijtihad dan ia layak dipilih, *ahlul al-aqdi wa al-hal* (parlemen) menawarkan jabatan *Imam* (khalifah) kepadanya. Jika ia bersedia menjadi *imam* (khalifah), mereka segera mengangkatnya. Dengan pembaitan mereka, ia secara resmi menjadi *imam* (khalifah) yang sah, kemudian seluruh ummat membaiaatnya dan taat kepadanya, namun jika ia menolak dijadikan *imam* (khalifah), dan tidak memberi jawaban, ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan *imam* (khalifah) karena *imamah* (kepemimpinan) adalah *akad* atas dasar kerelaan, dan tidak boleh ada unsur paksaan di dalamnya. Untuk selanjutnya, jabatan *imam* (khalifah) diberikan kepada orang lain yang layak menerimanya.⁴³

Jika yang memenuhi kriteria ada dua orang, maka yang dipilih ialah orang yang lebih tua-kendati usia bukan termasuk kriteria. Sah juga kalau yang dipilih ialah calon yang paling muda di antara keduanya.⁴⁴

Jika calon pertama lebih pandai dan calon kedua lebih berani, maka yang dipilih adalah siapa yang paling tepat pada zaman tersebut. Jika pada zaman tersebut yang dibutuhkan adalah keberanian karena adanya usaha melepaskan diri dari banyak wilayah perbatasan dan munculnya para pemberontak, maka calon pemberani lebih diutamakan. Jika yang dibutuhkan pada zaman tersebut adalah ilmu, karena kehidupan statis melanda banyak orang dan muncul tukang-tukang bid'ah, maka calon yang berilmu lebih diutamakan.⁴⁵

⁴³ Ibid, hal. 6

⁴⁴ Ibid, hal. 6

⁴⁵ Ibid, hal. 6



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika pilihan telah jatuh pada salah seorang dari keduanya kemudian terjadi perebutan di antara keduanya, maka sebagian fuqaha berpendapat, “aib sekali jika keduanya dilarang mendapatkan jabatan *imamah* (kepemimpinan) kemudian jabatan *imamah* (kepemimpinan) ini diberikan kepada orang ketiga.

Namun jumhur ulama dan fuqaha berpendapat, bahwa memperebutkan jabatan *imamah* (kepemimpinan) bukan merupakan sesuatu yang tercela dan terlarang. Mengincar jabatan *imamah* (kepemimpinan) bukan sesuatu yang makruh, karena anggota dewan syura tidak mendapatkan titik temu di dalamnya. Mereka tidak melarang orang menginginkannya.⁴⁶

Para fuqaha berbeda pendapat tentang teknis penyelesaian perebutan di antara keduanya yang mempunyai kemampuan berimbang. Sekelompok ulama berpendapat, bahwa dewan pemilih memilih siapa saja yang mereka kehendaki tanpa melalui undian. Jika dewan pemilih telah menjatuhkan pilihannya kepada orang terbaik di antara jama'ah kaum muslimin dan membaiaatnya sebagai *imam* (khalifah), kemudian setelah pembaitan tersebut ternyata ada orang yang lebih baik dari pada *imam* (khalifah) baru tersebut, maka baiat mereka tetap harus diberikan kepada orang *imam* (khalifah) tersebut dan mereka tidak boleh memberikannya kepada orang kedua tersebut.⁴⁷

Jika dewan pemilih membaiaat (mengangkat) non nominator padahal nominator masih ada, permasalahan ini harus dipikirkan dengan seksama. Jika pembaitan terselenggara karena adanya udzur misalnya sang nominator

⁴⁶ Ibid, hal. 7

⁴⁷ Ibid, hal. 7



tidak berada di tempat, atau sakit, atau non nominator ternyata lebih ditaati manusia dan lebih dekat ke hati manusia, maka penyelenggaraan bait terhadap non nominator tersebut dan kepemimpinannya sah.⁴⁸

Jika non nominator diba'at tanpa adzur, penyelenggaraan bait dan keabsahan kepemimpinannya dipermasalahkan. Sekelompok ulama termasuk di dalamnya Al-Jahidz berpendapat, bahwa penyelenggaraan bait terhadapnya tidak sah, karena jika pilihan telah jatuh kepada orang terbaik, maka pilihan tersebut tidak boleh diberikan kepada orang lain yang tidak lebih baik, seperti halnya dalam ijhtihad hukum-hukum syar'i.⁴⁹

Sebahagian besar fuqaha dan teolog memperbolehkan kepemimpinannya dan membenarkan pembaiatannya. Keberadaan orang terbaik tidak menjadi penghalang bagi kepemimpinan orang tidak terbaik, selama ia mempunyai kriteria-kriteria kepemimpinan.⁵⁰

Perinsip ini juga bisa diterapkan dalam lembaga peradilan di mana dibenarkan penunjukan orang yang tidak terbaik atas orang terbaik, karena kelebihan yang dimiliki orang yang terbaik hanya menambah bobot pemilihan dirinya, dan bukan termasuk kriteria-kriteria kelayakan menjadi pemimpin secara otomatis.⁵¹

Jika pada suatu zaman ternyata yang mempunyai kriteria-kriteria *imamah* (kepemimpinan) hanya ada satu orang dan tidak ada orang lain yang

⁴⁸ Ibid, hal. 7

⁴⁹ Ibid, hal. 7

⁵⁰ Ibid, hal. 8

⁵¹ Ibid, hal. 8

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilikinya, otomatis jabatan *imamah* (kepemimpinan) diberikan kepadanya dan tidak boleh diberikan kepada orang selain dirinya.⁵²

Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan kepemimpinan seorang *imam* (khalifah) tanpa prosedur akad dan pemilihan. Sebagian fuqaha Irak berpendapat, bahwa kepemimpinannya sah, dan ummat harus taat kepadanya, meskipun ia tidak dipilih dewan pemilih, karena tujuan dari pemilihan adalah untuk mengetahui kelebihan calon pemimpin, dan orang tersebut sudah bisa diketahui dengan sifat kepemimpinannya tersebut.⁵³

Mayoritas besar fuqaha dan para teolog berpendapat bahwa kepemimpinannya tidak sah kecuali dengan ridha dan proses pemilihan, namun dewan pemilih wajib memberikan kursi kepemimpinan kepadanya. Jika mereka mencapai kata sepakat, mereka menunjuknya sebagai *imam* (khalifah) karena kepemimpinan adalah akad yang tidak terselenggara kecuali dengan pihak yang melakukan akad. Begitu juga pada lembaga peradilan, jika tidak yang layak menjabatnya kecuali satu orang saja, ia tidak otomatis menjadi hakim hingga ia ditunjuk secara resmi.⁵⁴

Negara Islam berdiri di atas delapan struktur, yaitu: Khalifah (kepala negara), *Mu'awin Tafwidh* (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan), *Mu'awin Tanfidz* (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi), *Amirul Jihad* (Panglima Perang), *Wali* (Pimpinan Daerah), *Qadli* (Hakim), *Mashalih Daulah* (Departemen), *Majelis Umat* (Lembaga Wakil Rakyat).⁵⁵

⁵² *Ibid*, hal. 8

⁵³ *Ibid*, hal. 8

⁵⁴ *Ibid*, hal. 8

⁵⁵ Taqiyyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 1996), hal. 47



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalil struktur di atas adalah *af'al* (perbuatan) Rasulullah saw. Karena beliau telah membangun struktur negara dengan bentuk dan model seperti ini. Nabi saw. Adalah kepala negara dan ia memerintahkan kepada kaum muslimin agar mengangkat kepala negara, yaitu ketika ia memerintah mereka untuk mengangkat seorang khalifah dan imam.⁵⁶

1. Khalifah (Kepala Negara)

Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum-hukum syara'.⁵⁷ Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan menjadi milik umat, umat mewakilkan kepada seseorang untuk melaksanakan urusan tersebut sebagai wakilnya. Bahkan Allah juga telah mewajibkan kepada umat untuk menerapkan hukum syara' secara keseluruhan.

Dengan demikian, khalifah hanyalah orang yang diangkat oleh kaum muslimin Karena itu, faktanya adalah bahwa khalifah merupakan wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum syara'. Oleh karena itu, tidak ada seorang khalifah pun kecuali setelah ia dibai'at oleh umat. Bai'at umat kepada khalifah dengan kekhilafahannya itu telah menjadikan khalifah sebagai wakilnya, dan pengangkatan jabatan khilafah untuk seorang khalifah dengan bai'at itu berarti telah memberikan kekuasaan kepada khalifah, sehingga umat wajib untuk mentaatinya.

⁵⁶ Ibid, hal. 47

⁵⁷ Anonim, *Muqaddimah Dustur*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2009), cet.2, hal. 124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

Orang yang memimpin urusan kaum muslimin tidak bisa disebut khalifah, kecuali setelah ia dibai'at oleh umat dengan *bai'at in'iqad* (bai'at pengangkatan) secara syar'i, dengan ridla dan bebas memilih, khalifah memiliki syarat-syarat *in'iqadul khilafah* (pengangkatan untuk menduduki kekhilafahan). Setelah pengangkatan khilafah dinyatakan sah bagi seorang khalifah, ia harus segera menerapkan hukum-hukum syara'.⁵⁸

a) Syarat-syarat khalifah

Seorang khalifah harus memenuhi tujuh syarat agar dia bisa memegang tampuk kekhilafahan, juga agar bai'at terhadap pengangkatan jabatan kekhilafahannya dapat diberikan. Tujuh syarat tersebut adalah syarat sahnya pengangkatan seorang khalifah (*syurutul in'iqad*). Apabila salah satu dari ketujuh syarat ini kurang, jabatan kekhilafahan ini tidak dapat diberikan.⁵⁹

Pertama, muslim. Karena itu, khilafah secara mutlak tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Dan hukum mentaati orang kafir itu tidak wajib. Karena Allah SWT. berfirman:

وَلَنَجْجَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang mukmin."⁶⁰

⁵⁸ Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, op.cit., hal. 51

⁵⁹ Taqiyuddin Al-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah Juz II*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2003), cet. 5, hal. 31

⁶⁰ (Q.S. An Nisa': 141)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan (kekuasaan) adalah jalan yang paling kuat bagi seorang *hakim* (penguasa) untuk memaksa rakyatnya. Ditambah pernyataan Allah dengan menggunakan "*Lan*" yang biasa dipergunakan untuk menyatakan penafian selama-lamanya (*nafyut ta'bid*) itu bisa menjadi indikasi (*qarinah*) tentang adanya larangan terhadap orang kafir untuk memimpin pemerintahan kaum muslimin, baik untuk menjadi khalifah maupun yang lain, semuanya tadi merupakan larangan yang tegas dan pasti (*nahyan jaziman*). Selama Allah mengharamkan orang-orang kafir untuk memiliki jalan agar bisa menguasai kaum muslimin, hukumnya haram bagi kaum muslimin untuk menjadikan orang kafir menjadi penguasa mereka⁶¹.

Disamping itu, khalifah esensinya merupakan seorang *waliyul amri*, sedangkan Allah mensyaratkan agar *waliyul amri* kaum muslimin itu adalah seorang muslim. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri dari kamu sekalian."⁶²

Kata *ulil amri* tidak pernah disebut di dalam Al Qur'an, kecuali selalu disertai indikasi agar mereka adalah kaum muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa *waliyul amri* disyaratkan harus orang Islam. Kalau khalifah merupakan *waliyul amri*, ia juga bisa mengangkat

⁶¹ Taqiyuddin Al-Nabhani, *Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah Juz II*, op.cit., hal. 31 (Terjemah. Q.S. An Nisa': 59)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waliyul amri yang lain, seperti para *mu'awin*, *wali* dan para *amil*, orang yang diangkat oleh khalifah itu disyaratkan harus orang Islam.

Kedua, laki-laki. wanita tidak bisa menjadi khalifah. Dengan kata lain, khalifah harus laki-laki. Dia tidak boleh seorang wanita. *Ketiga*, baligh. Tidak boleh anak-anak diangkat menjadi khalifah. *Keempat*, berakal. Tidak sah orang gila menjadi khalifah. *Kelima*, adil, yaitu orang yang konsisten dalam menjalankan agamanya (bertakwa dan menjaga *muruah*). Jadi tidak sah orang fasik diangkat menjadi seorang khalifah. Adil adalah syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan khilafah serta keberlangsungan akad pengangkatannya. *Keenam*, merdeka. Seorang hamba sahaya tidak sah menjadi khalifah, karena dia adalah milik tuannya sehingga dia tidak memiliki wewenang untuk mengatur, bahkan terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian, dia tidak layak untuk mengurus orang lain, apalagi menjadi penguasa atas manusia. *Ketujuh*, mampu melaksanakan amanat khilafah. Sebab hal ini termasuk syarat yang dituntut oleh bai'at. Jadi, tidak sah bai'at kepada seseorang yang tidak sanggup untuk mengemban urusan umat (amanat khilafah) berdasarkan kitab dan sunah. Karena berdasarkan kitab dan sunah inilah dia dibai'at.⁶³

b) Baiat

Secara bahasa, kata baiat merupakan kata yang memiliki banyak arti (*lafzhun musytarak*). Dalam bahasa Arab baiat dipakai dengan beberapa arti. Diantaranya digunakan dengan arti *ash-*

⁶³ Taqiyuddin Al-Nabhani, *Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah Juz II, op.cit.*, hal. 33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shafqah 'ala ijab al-bay' (transaksi atas penawaran (ijab) jual beli). *Tha'ah* (pemberian kekuasaan dan ketaatan), *wa qad tabaya'u 'ala al-'amr* (sungguh mereka telah saling bersepakat atas suatu perkara), dengan makna 'ahada (membuat kesepakatan dengan) seperti kata-kata anda *ashfaqu 'alayhi, wa baya'ahu 'alayhi mubaya'atan, yakni 'ahadahu* (membuat kesepakatan perjanjian dengannya)⁶⁴, karena baiat serupa dengan menerima dan memberi harta benda.⁶⁵

Kata baiat juga digunakan dalam pengertian *al-mu'aqidah* (orang yang mengadakan perjanjian) dan dalam hadits '*ala tubayi'uni 'ala al-Islam* (ingatlah kalian mengadakan perjanjian denganku atas Islam) merupakan ungkapan mengenai *al- Mu'aqidah* (orang yang mengadakan perjanjian)⁶⁶ seakan akan masing-masing dari kedua belah pihak saling menjual apa yang dimilikinya yakni ikut bersamanya, secara ikhlas memberikan dirinya, mentaatinya dan menyerahkan urusannya.

Menurut istilah lafadz baiat adalah *musytarak* (memiliki banyak arti). Al-Quran datang dan menggunakan sebagian arti tersebut. Begitu juga dengan al-Sunnah. Akan tetapi para ulama politik Islam ('Ulama al-Siyasah al-Syar'iyyah) tidak memberikan kepada kita definisi tertentu untuk lafadz bait, padahal mereka mengerti dengan sangat dalam dan cermat realitas baiat secara

⁶⁴ Ibn Mandhur, *Lisan al-'Arab* jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Cet.1, hal. 299

⁶⁵ Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathu Al-Baari, Syarah Shahih Al-Bukhari* jilid I, (Riyadh: Maktabah Darussalam, 1997), hal. 71

⁶⁶ Ibn Mandhur, *Op., Cit.*, hal. 914



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik. Mereka membicarakan masalah baiat dan mereka menjelaskan bahwa baiat adalah metode pengangkatan kepala Negara. Seseorang tidak akan menduduki jabatan khilafah kecuali telah sempurna baginya *baiat al-in'iqad* (baiat pengakadan/pengangkatan) yang dilakukan oleh umat berdasarkan kerelaan dan pilihan mereka sendiri.

Dengan demikian baiat adalah metode syar'iy (Islam) satu-satunya dalam memilih dan mengangkat seorang penguasa menjalankan pemerintahan sesuai dengan apa yang diturunkan Allah. Definisi yang dekat dengan pengertian ini adalah yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun dalam mendefinisikan baiat yaitu:

*“Sesungguhnya baiat adalah perjanjian atas ketaatan. Seakan-akan orang yang membaiat membuat perjanjian dengan pemimpinnya untuk menyerahkan kepada pemimpinnya (menentukan) pandangan (kebijakan) dalam urusan kaum muslim, berjanji tidak akan menentanginya mengenai sesuatu diantara urusan-urusan tersebut, dan berjanji akan mentaatinya terkait dengan perintah yang dibebankan olehnya, baik perintah itu disenangi ataupun dibenci”.*⁶⁷

Dari perkataan itu jelas bahwa baiat adalah perjanjian antara umat dengan penguasa, yaitu agar penguasa menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum-hukum syara', agar umat mentaati penguasa. Tampak pemahaman Ibnu khaldun itu benar, sebab dia menyebut baiat dalam konteks kekuasaan milik umat, karena umat yang mengangkat Khalifah. Begitu juga umat yang memecat dan menoreksi Khalifah jika Khalifah menyimpang dari

⁶⁷ Ibnu Khaldun, *op.cit.*, jili d.2, hal. 549



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian dan akad. Istilah yang paling tepat dalam menjelaskan realitas baiat adalah *Baiat adalah hak umat dalam melaksanakan akad penyerahan kekhilafahan*.⁶⁸

Definisi inilah yang menjadi pilihan kami (kami adopsi), sebab pendapat ini mensifati baiat dari aspek bahwa baiat merupakan salah satu aspek aktifitas politik yang dilakukan umat yang menggunakan haknya dalam kekuasaan yang sejak semula hak itu dimiliki oleh umat. Karena kepala Negara tidak akan menjalankan kekuasaan kecuali melalui baiat. Baiat merupakan pilar yang paling mendasar bagi kekuasaan umat. Artinya jika umat tidak menjalankan haknya dalam baiat, maka kekuasaan benar-benar tercabut dari umat, akibatnya system pemerintahan islam menjadi rusak, sebab sebagian gambarnya keluar dari ketentuan syara'.⁶⁹

Terkait dengan sifat pengambilan baiat, maka syara' tidak menentukan sifat-sifat dan sarana-sarana tertentu dalam melangsungkan pengambilan dan pemberian baiat. Dengan demikian, baiat secara syari'ah dilaksanakan dengan sarana apapun diantara sarana-sarana yang mampu menghantarkan pada terlaksananya akad baiat.

Setelah pengamatan dengan seksama kejadian-kejadian pengambilan baiat dalam kehidupan politik, baik pada masa Nabi

⁶⁸ Mahmud 'Abd al-Majid al-Khalidi, *Qowa'id Nizham al-Hukmi fi al-Islam*, (Amman: Al-Maktabah Al-Muhtasib, 1983), hal. 136

⁶⁹ Abi Ya'la Muhammad, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hal. 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saw maupun pada masa Khulafa' al Rasyidin , didapati baiat diambil dengan berjabat tangan, tulisan (surat) dan dengan lisan.

Baiat dengan berjabat tangan diantaranya: baiat al-Ridwan.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

Artinya: “Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka”

Baiat itu terjadi ketika Rasulallah menyuruh melakukan *Baiat al-Ridwan*. Utsman bin Affan menjadi utusan Rasulallah kepada penduduk Mekah. Orang-orang berbaiat, lalu mereka berkata: Rasulallah bersabda: “Ya Allah! Sesungguhnya Utsman butuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu Beliau memukulkan kedua tangannya ke tangan yang lain. Dengan demikian, tangan Rasulallah bagi Utsman lebih baik dari tangan mereka terhadap diri mereka sendiri.⁷⁰

Baiat dengan tulisan contohnya yang dikirim al-Najasyi al-Asham bin Abhar kepada Rasullullah saw:

“Bismillahi al-Rahman al-Rahim, kepada Muhammad saw dari al-Najasyi al-Asham bin Abhar, keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah yang tiada Tuhan selain Dia yang telah menunjuki aku kepada Islam, semoga tercurah kepada Anda wahai Nabiyullah. Kemudian setelah itu, surat yang anda kirim telah sampai kepadaku, Wahai Rasulallah. Isinya antara lain anda menyebutkan tentang

⁷⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur`an al-`Azhim* Vol. 4, (Riyadh: Dar `Alam al-Kutub, 1997), hal. 186



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengukuhkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*perkara Isa. Maka demi tuhan yang mengatur langit dan bumi bahwa Isa tidak lebih dari apa yang anda sebutkan. Sesungguhnya Isa itu sebagaimana yang anda sebutkan. Sungguh kami telah mengerti sesuatu yang dengannya Anda diutus kepada kami. Sungguh kami telah dekat dengan anak pamanmu dan temantemannya, dan kami bersaksi bahwa Anda adalah Rasulullah yang jujur yang dapat dipercaya. Aku membaiat Anda, dan membaiat anak paman Anda beserta temantemannya. Aku telah masuk Islam ditangannya semata karena Allah Tuhan semesta alam.*⁷¹

c) Terwujudnya Akad Khilafah

Khilafah adalah akad yang dibangun atas dasar kerelaan dan pilihan, kerana merupakan bai'at untuk taat kepada seseorang yang mempunyai hak ditaati dalam kekuasaan. Jadi, dalam hal ini harus ada kerelaan dari pihak yang dibai'at untuk memegang tampuk kekuasaan dan kerelaan pihak yang membai'atnya. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak bersedia menjadi khalifah dan menolak jabatan khilafah, ia tidak boleh dipaksa atau ditekan untuk menerimanya, tapi harus dicarikan orang lain untuk menduduki jabatan tersebut. Demikian pula tidak boleh mengambil bai'at dari kaum muslimin dengan kekerasan dan pemaksaan, karena dalam keadaan demikian akad yang dilakukan tidak dianggap sah. Sebab, khilafah adalah akad yang dibangun atas dasar kerelaan dan pilihan, tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan.⁷²

2. Mu'awin

Mu'awin adalah para pembantu yang telah diangkat oleh khalifah agar mereka membantunya dalam rangka mengemban tugas-tugas khilafah, serta melaksanakan tanggungjawab khilafah tersebut.

⁷¹ Taqiyuddin al-Nabhani, *al-Sakhshiyah al-Islamiyah Jilid 2*, op.cit., hal. 23

⁷² Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, op.cit., hal. 58

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedemikian besar tugas khilafah --khususnya ketika wilayah negara khilafah menjadi besar dan luas, dan khalifah sulit untuk mengemban tugasnya sendirian-- sehingga dia membutuhkan orang-orang yang membantunya dalam mengemban dan melaksanakan tanggungjawab-tanggungjawabnya. Mu'awin yang telah diangkat oleh khalifah untuk membantu melaksanakan tugas-tugas khilafah tersebut ada dua yaitu: *Wuzaraut Tafwidh* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dan *Wuzaraut Tanfidz* (pembantu khalifah bidang administrasi).⁷³

3. **Mu'awin Tafwidh ((Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan)**

Mu'awin tafwidh adalah pembantu yang diangkat oleh khalifah agar dia bersamasama khalifah memikul tanggungjawab pemerintahan dan kekuasaan. Khalifah akan menyerahkan kepada mu'awin agar dia mewakilinya dalam mengurus urusan-urusan negara dengan pendapatnya serta memutuskan urusan-urusan tersebut dengan ijtihadnya berdasarkan hukum-hukum syara'.⁷⁴

4. **Mu'awin Tanfidz (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi)**

Mu'awin tanfidz adalah *wazir* (pembantu) yang diangkat oleh seorang khalifah untuk membantunya dalam masalah operasional dan senantiasa menyertai khalifah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ia adalah seorang protokoler (perantara) yang menjadi penghubung antara khalifah dengan aparat negara yang lain, serta menjadi penghubung antara khalifah dengan rakyat, dan antara khalifah dengan negara-negara lain, di

⁷³ *ibid.*, hal. 129

⁷⁴ *Ibid.* Hal/ 129

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luar. Ia bertugas menyampaikan kebijakan-kebijakan dari khalifah kepada mereka, serta menyampaikan informasi-informasi yang berasal dari mereka kepada khalifah.⁷⁵

5. Amirul Jihad (Panglima Perang)

Amir jihad adalah orang yang diangkat oleh khalifah untuk menjadi pimpinan dalam bidang luar negeri, peperangan, pertahanan dan keamanan (hankam) dalam negeri, serta bidang perindustrian. Ia bertugas untuk memimpin dan mengarahkannya.⁷⁶

6. Wali (Pimpinan Daerah)

Wali adalah orang yang diangkat oleh khalifah sebagai pejabat (*hakim*) di salah satu wilayah kekhilafahan serta menjadi pimpinan di sana.⁷⁷

Negeri yang diperintah oleh negara Islam dipilah menjadi beberapa *wihdat* (bagian) dan masing-masing bagian itu disebut *wilayah* (setingkat propinsi atau daerah tingkat I). Setiap wilayah dipilah lagi menjadi beberapa *wihdat* (bagian), masing-masing bagian itu disebut '*imalah* (setingkat daerah tingkat II). Sedangkan orang yang memimpin *wilayah* itu disebut *wali* dan orang yang memimpin '*imalah* disebut '*amil* atau *hakim*.⁷⁸

7. Qadli (Hakim)

Al- Qadla secara bahasa berarti putus, menunaikan, mencegah, memutuskan hukum. Secara istilah al-Qadla memiliki beberapa makna,

⁷⁵ Taqiyuddin Al-Nabhani, *Daulah al-Islamiyyah, op.cit.*, hal. 307

⁷⁶ Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam, op.cit.*, hal. 144

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 154

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 172

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang pertama; “kekuasaan yang dikenal (kekuasaan yang mengadili dan memutuskan perkara)” ; kedua, “menyelesaikan perkara pertengkar untuk melenyapkan gugat menggugat dan untuk memotong pertengkar dengan hukum-hukum syara` yang dipetik dari al-Qur`an dan Sunnah”.⁷⁹

Menurut `Ukbary dalam *kulliatnya* yang dimaksud dengan al-qadla adalah“ Peraturan yang diikuti, yang terbit dari penguasa, yang mempunyai kekuasaan umum”.⁸⁰

8. Jihazul Idary (Aparat Administrasi)

Penanganan urusan negara serta kepentingan rakyat itu diatur oleh departemen, jawatan dan unit-unit yang didirikan untuk menjalankan urusan negara serta memenuhi kepentingan rakyat tersebut. Di setiap departemen akan diangkat direktur jendral, juga di setiap jawatan akan diangkat kepala jawatan yang mengurus jawatannya, termasuk yang bertanggungjawab secara langsung terhadap jawatan tersebut. Seluruh pimpinan itu bertanggungjawab kepada orang yang memimpin departemen, jawatan dan unit-unit mereka yang lebih tinggi, dari segi pertanggungjawaban terhadap kegiatan mereka serta bertanggungjawab kepada wali, dari segi pertanggungjawaban terhadap keterikatan pada hukum dan sistem secara umum.⁸¹

9. Majelis Umat (Lembaga Wakil Rakyat).

Majelis ummat adalah majelis yang terdiri dari orang-orang yang mewakili suara (aspirasi) kaum muslimin, agar menjadi pertimbangan

⁷⁹ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 9-11

⁸⁰ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, *op.cit.*, hal. 7

⁸¹ Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hal. 207



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khalifah dan tempat khalifah meminta masukan dalam urusan-urusan kaum muslimin.¹⁴⁹ Mereka mewakili umat dalam melakukan *muhasabah* (kontrol dan koreksi) terhadap para pejabat (*hukkam*). Hal ini diambil dari pengkhususan Rasulullah saw. terhadap 14 orang pemimpin, yang terdiri dari kaum Anshar dan Muhajirin untuk menjadi tempat rujukan dan meminta masukan dalam berbagai persoalan. Semuanya menunjukkan kebolehan membentuk majelis khusus yang mewakili umat dalam melakukan kontrol dan koreksi terhadap para pejabat, serta dalam *syura* (mengambil pendapat) yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan As Sunnah. Majelis ini disebut dengan sebutan majelis umat, karena merupakan wakil umat dalam melakukan *muhasabah* dan *syura*.⁸²

⁸² Taqiyuddin Al-Nabhani, *Daulah al-Islamiyyah, ibid.*, hal. 126

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Keputusan Kepala Desa Nomor 27 tahun 2018 tersebut dia atas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 bukanlah Panitia Penjaringan Perangkat Desa tetapi Panitia Pengisian Perangkat Desa. Keputusan Kepala Desa Nomor 27 tahun 2018 tersebut adalah Panitia Penjaringan Perangkat Desa, maka tugasnya hanya pada tahap penjaringan saja sebagaimana maksud pasal 31 sampai pasal 37 saja, dan tidak berhak melakukan tahap penyaringan dan tahap pengangkatan perangkat desa karena keputusan kepala desa tersebut adalah dasar panitia melakukan tugasnya.
2. Pembentukan panitia pengisian perangkat desa kuala selat dilaksanakan terlambat dibentuk karena hampir semua masa jabatan perangkat desa telah berakhir masa jabatannya. Sedangkan berdasarkan pasal 32 ayat 1 Perda Kab. Inhil No. 4 tahun 2015 mestinya enam bulan sebelum masa jabatan perangkat desa tersebut kepala desa harus membentuk panitia pengisian perangkat desa. Kemudian terdapat formasi yang langsung diisi berdasarkan rekomendasi kepala desa kuala selat tanpa melalui proses seleksi sebagaimana formasi lainnya. Menjadi hal yang tidak sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa karena formasi yang langsung diisi berdasarkan rekomendasi langsung oleh kepala desa.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pembantu Khalifah bidang pemerintahan (*mu'awin fatwidh*) adalah pembantu yang telah diangkat oleh Khalifah untuk membantunya dalam mengemban tanggungjawab dan melaksanakan tugas-tugas keKhalifahaan. Apabila Khalifah wafat, maka masa jabatan *mu'awin* juga selesai. Dia tidak melanjutkan aktifitasnya kecuali selama masa jabatan amir sementara saja. Dengan demikian langkah Kepala Desa langsung mengangkat perangkat desa tanpa melalui proses seleksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 tidaklah bertentangan dengan fiqih siyasah.

B. Saran

1. Hendaknya Kepala Desa Kuala Selat harus betul-betul teliti dalam menetapkan keputusan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa keputusan yang harus dibuat oleh Kepala Desa adalah Panitia Pengisian Perangkat Desa, bukan Pembentukan Panitia Penjaringan Perangkat Desa.
2. Hendaknya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa.



DAFTAR PUSTAKA

1. Asy-Syaikh Taqiyuddin, *Muqaddimah ad-Dustur aw al-Asbab al-Mujibah Lahu*, (Beirut: Darul Ummah, 2009), Jilid I
2. Aaidin Koto (et.al), *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2011
3. Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6
4. Sukriono, *Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 1, PKK Universitas Kanjuruhan Malang, Malang, 2008
5. Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2010
6. B. Handono, *Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa*, FPPD, Yogyakarta, 2005
7. Fakrullah, Zudan, dkk. 2004. *Kebijakan Desentralisasi Persimpangan*. Jakarta. CV. Cipruy.
8. Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*, PT Bumi Aksara : Yogyakarta
9. Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
10. Dadang, 2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.
11. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
12. Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Darul Falah, 2006
13. Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathu Al-Baari, Syarah Shahih Al-Bukhari*, Riyadh: Maktabah Darussalam, 1997, jilid VIII
14. H.A. Dzazuli *Fiqih Siyasah (Implementasi Kemaslhatan Umat dalam Rambu-rambu Syaria)*, Jakarta: Kencana, 2009



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Mahmud Al-Khalidi, *Qawaid Nizham Al-Hukmi*, Amman: Al-Maktabah Al-Muhtasib, 1983
 Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011
 Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa*. Yayasan Karya Dharma IIP. Jakarta
 R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989
 Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984
 Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984
 Suhartono, *Politik Lokal Parlemen Desa*, Lapera Pustaka Utama., Yogyakarta, 2000
 Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1981
 Taqiyuddin al-Nabhani, *al-Daulah al-Islamiyah*, Beirut: Dar al-Ummah, 2002
 _____ *Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, jilid III, Beirut: Dar al-Ummah, 1994
 Widjaja HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
 W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007
 Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

DOKUMENTASI

© Hak



ultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul, *PELAKSANAAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA KUALA SELAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH* yang ditulis oleh :

Nama : **ANDIGOD**
NIM : 11424103819
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Januari 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. H. Zainal Arifin, MA
Nip. 19650704 199402 1001

Sekretaris
Syukran S.HI, M.Sv
Nik. 130217 035

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag
Nip. 19720308 200312 1002

Penguji II
Dr. H. Mawardi M. Shaleh, Lc., MA
Nip. 19690624 200112 1002

Kepala Sub. Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email: admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **ANDIGOD**

NIM : **11424103819**

Program Studi: **HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

Judul : *Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Kuala Selat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Tinjauan Fiqih Siyasa*

Pembimbing : **Afrizal Ahmad, M.Sy**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 14 Januari 2020



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIK. 198804302019031010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW
Jl. H. R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5000/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 21 Mei 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ANDIGOD
NIM : 11424103819
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi : Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

كلية الشريعة والعلوم

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box. 1004 Telp. 0761-661845
Fax. 0761-562052, Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul “ **PELAKSANAAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA KUALA SELAT KECAMATAN KATEMAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH** ” yang ditulis oleh saudara :

Nama : ANDIGOD
NIM : 11424103819
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 16 Mei 2019
Narasumber : Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub Bagian Akademik

Asfendi, S. Ag., M.Si
NIP. 19610918 198803 1 002

Pekanbaru,

Narasumber

Dr. Wahidin, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19710108 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. http://fasih.uin-suska.ac.id, E-mail : fsihuinriau@gmail.com

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. NAMA | : Andigod |
| 2. NOMOR MAHASISWA | : 11424103819 |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN | : Pelaksanaan rekrutmen perangkat desa kualu selat berdasarkan peraturan daerah kabupaten indragiri hilir nomor 4 tahun 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam tinjauan fiqh siyasah |
| 4. Hari/Tgl. Diseminarkan | : Kamis / 16 Mei 2019 |
| 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah : | |
| a. Judul | : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan |
| b. Latar Belakang Masalah | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| c. Permasalahan | : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada) | : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada) | : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam |
| g. Metode Penelitian | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| h. Daftar Pustaka | : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti |

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Dr. Wahidin, MA

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.LPP.01.1/5849/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini
menerangkan bahwa :

Nama : ANDIGOD
N I M : 11424103819
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (JINAYAH SIYASAH)

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 20 JUNI 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 18 Juli 2019

Dekan,


DR. Drs. H. Hajar, M. Ag
NIP. 195807121986031005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/23145
TENTANG



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5000/2019 Tanggal 21 Mei 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

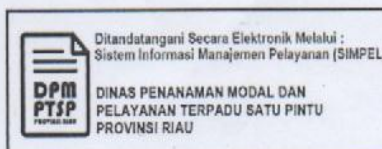
1. Nama : ANDIGOD
2. NIM / KTP : 11424103819
3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA KUALA SELAT KECAMATAN KATEMAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH
7. Lokasi Penelitian : DESA KUALA SELAT KECAMATAN KATEMAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Mei 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir

Us. Kepala Kecamatan dan Lintas di Tambahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Akasia No.01 Telephone ☎ (0768) 22904 Faximile (0768) 21383
Tembilahan Kode Pos 29211

**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2019/1976

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/23145 Tanggal 23 Mei 2019, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **ANDIGOD**
NIM : 11424103819
Program studi/Jenjang : Hukum Tata Negara (SIYASAH) / S1
Alamat : Kuala Selat Kecamatan Kateman
Judul Penelitian : **PELAKSANAAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA KUALA SELAT KECAMATAN KATEMAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH**
Lokasi Penelitian : **DESA KUALA SELAT KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 28 Mei s/d 28 Agustus 2019.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 28 Mei 2019

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Kabid Kewaspadaan dan Pengawasan Orang Asing

KAMALUDDIN, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19711111 199503 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
Dekan Fakultas Svariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN KATEMAN
DESA KUALA SELAT**

Alamat : Jalan Hangtuah Nomor. 01 kuala selat Kode Pos 29255

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 03/SK / KS/ VIII/ 2019

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi di kantor Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang dilakukan oleh :

NAMA	: ANDIGOD
NIM	: 11424103819
UNIVERSITAS	: UIN SUSKA RIAU
FAKULTAS	: SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN	: HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di kantor Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Dengan judul Skripsi, *Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Tinjauan Fiqih Siyasa*.

Demikian surat keterangan pelaksanaan kegiatan riset dan pengumpulan data ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Selat, 01 Agustus 2019
KEPALA DESA


IMAM TAUFIK, S.Pd



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

ANDIGOD dilahirkan di desa Kuala Selat, Kec. Kateman Kab. INHIL pada 05 Mei 1994, yang merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad dan Ibu Rohaya. Pada tahun 2003 penulis memasuki jenjang pendidikan dasar di SDN 31 Kuala selat sampai tahun 2007, lalu penulis hijrah ke sekolah SDN 13 Selat Panjang dan tamat pada tahun 2008, lalu melanjutkan ke SMPN 1 Atap Kuala Selat dan tamat pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 2 Singkep Kabupaten Lingga dan tamat pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 tersebut penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil jurusan Jinayah Siyasah dan berubah menjadi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dan pada tanggal 1 September hingga 31 Oktober 2016 penulis melakukan magang pada kantor Kejaksaan Negeri Tembilahan serta melakukan Kukerta (Kuliah Kerja Nyata) pada Juli hingga Agustus 2017 di Desa Benayah Kecamatan Pusako Kabupaten Siak.

Setelah melakukan Kukerta dan menyelesaikan seluruh mata kuliah, dengan Rahmat Allah SWT pada Desember 2019 penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA KUALA SELAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH”** di bawah bimbingan bapak Afrizal Ahmad M.Sy.

Selama kuliah penulis pernah bergabung dalam kegiatan mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) atau HMI HTN (S) dan Kementrian Dalam Univesitas (KEMENDANIV) di Badan Eksekutif Mahasiswa UIN SUSKA atau BEM UIN SUSKA